

PERAN DITKERSINHAN (DIREKTORAT KERJASAMA INTERNASIONAL PERTAHANAN) KEMENHAN DALAM KERJASAMA INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA

Yusep Ginanjar

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani
yusep.ginanjar@lecture.unjani.ac.id

Abstract

Defense cooperation is something that is very important for Indonesia, especially when it begins to identify various potential threats through an outward looking view of the Indonesian defense system. In this situation, Indonesia needs to increase its defense cooperation with countries in Southeast Asia to fulfill its national interests, namely to establish regional stability as an effort to overcome various potential threats. In this situation, Southeast Asia is in the middle of the Indo-Pacific region which is very strategic and is always contested by major world powers, in this case the rivalry between the United States and China which want to spread their influence in the Indo-Pacific region. This research aims to look at the role of Ditkersinhan as a government institution in Indonesia which is fully responsible for international defense cooperation, specifically in the role of defense cooperation with countries in Southeast Asia. This research uses a qualitative-descriptive approach using literature study and interview data collection techniques. The results of this research show that Ditkersinhan plays a very active role in all defense cooperation carried out by Indonesia, for which Ditkersinhan has responsibility from the opening of the cooperation dialogue to the preparation of the draft agreement which is the result of the cooperation carried out. Ditkersinhan's role is said to be effective as proven by the large number of defense collaborations carried out by Indonesia with countries in the Southeast Asia region.

Keywords: Defense Cooperation, Ditkersinhan, Regional Stability, Southeast Asia, Indo-Pacific.

PENDAHULUAN

Pertahanan suatu negara menjadi sesuatu yang sangat penting mengingat kelangsungan hidup masyarakat menjadi hal yang utama, dalam hal ini peningkatan aspek pertahanan dan keamanan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menghadapi perkembangan dunia pada saat ini. Pada era globalisasi dewasa ini, ancaman dalam bidang keamanan menjadi semakin kompleks dan berkembang, diantaranya mencakup terorisme internasional, pengembangan senjata pemusnah massal, kriminal terorganisasi, *cybercrime*, kelangkaan energi, degradasi lingkungan dan

berbagai resiko keamanan yang terkait dengannya, bencana alam ataupun bencana yang disebabkan oleh manusia sendiri, dan lain sebagainya (Kementerian Pertahanan RI, 2008). Untuk menghadapi ancaman-ancaman seperti tersebut di atas, akan dibutuhkan interaksi dalam bentuk kerjasama yang luas dengan sinergisitas yang mantap antar negara-negara di dunia, sehingga diharapkan mampu melakukan langkah-langkah pendekatan terhadap isu-isu keamanan internasional kontemporer melalui kerjasama intensif dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Pada upaya peningkatan pertahanan dan keamanan suatu negara, kita mengenal adanya konsep *self-help* untuk meningkatkan kapabilitas secara mandiri maupun konsep kerjasama pertahanan dengan melibatkan pihak lain dalam upaya peningkatan tersebut. Pada keadaan ini peningkatan kerjasama pertahanan dengan kedua metode pendekatan tersebut tetap memiliki tujuan yang sama, yakni untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat (warga negara) dan mempertahankan kedaulatan dari suatu negara. Berbicara tentang pertahanan dan keamanan tentunya tidak dapat dilepaskan dari kekuatan militer sebagai subjek pertahanan dan keamanan. Saat ini bangsa-bangsa di dunia telah menyadari pentingnya kekuatan militer sebagai subjek pertahanan yang multidimensional atau tidak hanya dapat berperan sebagai kekuatan bersenjata semata tetapi juga berperan sebagai *key factor* dalam menampilkan eksistensi dan integritas dalam berbagai aspek baik ideologi, politik, sosial budaya bahkan ekonomi. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas saat ini yaitu bahwa pada umumnya negara dengan kekuatan militer yang besar dan disegani memiliki daya tawar diplomasi yang tinggi, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kekuatan militer berbanding lurus dengan nilai tawar diplomasi.

Pembahasan mengenai negara-negara yang memiliki kapasitas militer terbaik di dunia, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejauhmana negara tersebut mau berfokus pada perbelanjaan militer yang efektif dan efisien dengan gelontoran dana yang cukup fantastis. Pada tahun 2008 misalnya, terlihat dengan jelas bahwa negara-negara maju seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dan negara-negara Eropa menggelontorkan dana yang sangat

fantastis dalam pembelanjaan militernya yang saat ini sangat terbukti bahwa hal tersebut memiliki dampak yang sangat besar pada kapabilitas militer mereka dan diplomasi internasional (Hermawan, 2015). Namun keadaan ini akan berbeda dengan Indonesia yang tentu selama ini tidak memberikan fokus sebesar negara-negara tersebut untuk meningkatkan kapasitas militernya secara mandiri, yang mana oleh karena itu kerjasama pertahanan dan keamanan menjadi sesuatu yang dapat menjadi alternatif utama untuk meningkatkan kapasitas militernya. Pada keadaan ini kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara-negara di Asia Tenggara.

Pada dunia kontemporer ini Indonesia perlu merubah pandangan militernya menjadi *outward looking*, yang mana dengan ini Indonesia perlu menunjukkan bahwa pertahanannya memiliki pandangan “ke luar” yang mana hal ini bermaksud bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia internasional sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu perwujudan dari pandangan ini adalah dengan adanya peningkatan hubungan kerjasama pertahanan dengan negara-negara di Asia Tenggara, hal ini dilakukan dengan mengingat bahwa terdapat pula berbagai ketegangan internasional yang terjadi di sekitar kawasan Asia Tenggara seperti eskalasi konflik di Laut China Selatan dan fenomena terbentuknya AUKUS untuk mencegah ekspansi Tiongkok di Indo-Pasifik. Pada akhirnya dengan ini kerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara sebagai negara terdekat menjadi sesuatu yang sangat penting, dalam hal ini untuk menciptakan ketahanan regional sebagai salah satu bentuk pertahanan dini terhadap eskalasi konflik yang sedang terjadi di dunia internasional saat ini.

Pada kondisi dalam negeri Indonesia sendiri, permasalahan mengenai aspek pertahanan dan keamanan secara khusus ditangani oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Lebih spesifik kita melihat terdapat Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (Ditjen Strahan) di Kementerian Pertahanan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Kep/19/M/12/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di

bidang penyelenggaraan strategi pertahanan. Sepanjang perjalanannya dari tahun 2000 hingga sekarang Ditjen Strahan Kemhan telah mengalami beberapa kali Reorganisasi dan Pergantian Pimpinan. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan inilah yang pada akhirnya memiliki peran besar untuk menentukan arah kebijakan pertahanan Indonesia, yang mana di dalamnya termasuk upaya meningkatkan kapasitas militer Indonesia secara mandiri melalui pelatihan maupun melalui kerja sama dengan negara lain.

Pada pembahasan mengenai kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara lain, Ditjen Strahan Kemhan memiliki unsur pelaksana tugas dan fungsi yang disebut dengan Direktorat Kerja Sama Internasional Pertahanan yang sering disebut dengan Ditkersinhan. Ditkersinhan sendiri merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Ditjen Strahan Kemhan yang memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan diplomasi pertahanan yang meliputi kerja sama bilateral, multilateral, pendidikan, dan perizinan serta koordinasi dengan atase pertahanan. Lebih lanjut, Ditkersinhan memiliki tugas dan pelaksanaan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang diplomasi pertahanan meliputi kerja sama bilateral dan multilateral pertahanan;
- b. Penyusun peraturan di bidang diplomasi pertahanan meliputi kerja sama bilateral dan multilateral pertahanan;
- c. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang diplomasi pertahanan meliputi kerja sama bilateral dan multilateral pertahanan;
- d. Pelaksanaan koordinasi atase pertahanan, perumusan kebijakan pendidikan, dan pengurusan perizinan; dan
- e. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtangaan direktorat.

Pada akhirnya penelitian ini berusaha untuk berfokus pada peran dari Direktorat Kerja Sama Internasional Pertahanan Kemhan RI yang menjadi garda terdepan bagi perkembangan kerja sama pertahanan Indonesia, yang mana secara spesifik kerja sama tersebut berfokus pada negara-negara di Asia Tenggara sebagai negara-negara yang dekat dengan Indonesia. Peran

tersebut dengan adanya isu-isu dalam keamanan internasional tentu menjadi salah satu penentu faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional dan regional dalam hal keamanan dan pertahanan negara. Sehingga meneliti mengenai peran dari ditkersinhan adalah suatu keniscayaan yang harus diteliti sebagai upaya dalam pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana Ditkersinhan menunjukkan peran aktifnya sebagai perumus kebijakan dalam kerjasama internasional pertahanan Republik Indonesia. Pada pemaparan latar belakang tersebut, maka peneliti memiliki pertanyaan penelitian berupa “Bagaimana peran Ditkersinhan dalam kerjasama militer dan pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara?”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif karena dianggap sesuai dengan keberfokusannya dalam menitikberatkan fenomena atau peristiwa sosial yang terjadi sebagai subjek penelitian, yang mana pendekatan ini melihat berbagai aspek penelitian seperti sudut pandang, motivasi, aktivitas, perspektif, dan perilaku masyarakat melalui metode-metode terkait (Moleong, 2006). Metode penelitian kualitatif memberikan pembahasan yang diutamakan atau difokuskan pada subjek penelitiannya, yaitu membahas mengenai sudut pandang peneliti terkait sebuah peristiwa, fenomena, kejadian, maupun beberapa kasus terkait dengan berbagai data yang relevan dalam menunjukkan beberapa potensi serta kelebihan dari penelitian yang dilaksanakan (Creswell, 2018). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk menyampaikan data dan argumen di dalamnya, yakni peneliti menjelaskan secara uraian kata (teks) untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini menyampaikan data-data dan argumen yang ada melalui tipe deskriptif, yakni menyampaikan secara uraian kata-kata mengenai penjelasan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

PEMBAHASAN

Urgensi Kerjasama Pertahanan Indonesia pada Era Kontemporer

Pada bagian tinjauan pustaka dan perspektif penelitian terlihat bahwa tulisan ini menggunakan pendekatan neo-realisme, yang mana dalam keadaan ini melihat bahwa suatu negara dapat meningkatkan kapabilitas militernya melalui cara-cara mandiri (*self-help*) maupun melalui kerjasama pertahanan dengan negara atau pihak lain. Walaupun dalam perspektif ini kita melihat bahwa kerjasama pertahanan dilakukan dengan adanya skema keuntungan relatif, yang mana hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kepentingan yang realistis di balik kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara seperti dalam artikel ini. Pada tahun 2023 ini kita melihat bahwa Indonesia menduduki posisi ke-13 dari negara dengan kapasitas militer terbesar di dunia yang bahkan mengungguli beberapa negara berpengaruh seperti Ukraina, Australia, Iran, Mesir, Israel, dan Arab Saudi yang posisinya berada di bawah Indonesia (GFP, 2023). Namun apabila kita melihat dari anggaran pertahanan, Indonesia berada di posisi ke-25 yang terpaut jauh dari beberapa negara yang secara total berada di bawah Indonesia kapasitas militernya. Salah satunya adalah Australia dengan anggaran pertahanan sebesar USD 52 miliar, sedangkan Indonesia hanya sebesar USD 8,8 miliar pada tahun 2023 (GFP, 2023).

Fenomena perbandingan di antara anggaran militer Indonesia dengan posisi kekuatan militer Indonesia di dunia tentunya menunjukkan anomali, dikarenakan dengan anggaran militer hanya sekitar USD 8,8 miliar pada tahun 2023 Indonesia dapat tetap berada di posisi ke-13 melampaui negara-negara lainnya dengan anggaran pertahanan yang jauh lebih besar dari Indonesia. Pada dasarnya keadaan ini tidak dapat dijelaskan secara sederhana dan terdapat beberapa faktor yang ada di dalamnya, namun dalam hal ini peneliti melihat bahwa Indonesia bukanlah tipikal negara yang berfokus pada skema mandiri (*self-help*) untuk meningkatkan kapasitas militernya. Keadaan ini semakin menunjukkan bahwa pada dasarnya Indonesia memiliki ambisi yang besar untuk meningkatkan SDM pertahanan

dan alutsista negaranya, namun dikarenakan Indonesia merupakan negara berkembang menuju negara maju maka anggaran yang dimilikinya harus digunakan secara bijak dan tidak dapat hanya dimaksimalkan atau difokuskan pada anggaran perbelanjaan militernya saja. Pada keadaan ini Indonesia sebagai negara dunia ketiga memiliki fokus yang terbagi dalam berbagai aspek untuk memastikan kelangsungan hidup masyarakatnya, karena tidak bisa jika Indonesia hanya berfokus pada anggaran pertahanan tanpa memperhatikan kondisi sektor lainnya.

Pada keadaan ini peneliti melihat bahwa Indonesia lebih memilih melakukan skema kerja sama internasional dengan negara-negara lain di dunia untuk dapat meningkatkan kapasitas militernya, yang mana sejauh ini skema kerjasama tersebut masih menjadi unggulan bagi Indonesia sehingga akan terus menjadi salah satu strategi andalan dalam pertahanan Indonesia melalui upaya diplomasi pertahanan. Pada era globalisasi saat ini tentunya bentuk ancaman semakin variatif yang menyebabkan Indonesia harus bersiap dengan ancaman militer dan nirmiliter, yang mana kerjasama internasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai keadaan tersebut. Ditjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Mayjen. Bambang Hartawan menyampaikan bahwa *“Kerjasama pertahanan itu dilakukan untuk kepentingan nasional suatu negara dalam kancah global agar tetap terjaga sehingga kepentingan suatu negara dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, kerjasama ini juga sebagai upaya menjaga kestabilan negara kawasan dan bukan untuk melawan pihak lain atau untuk berperang”* (Universitas Islam Indonesia, 2018). Pada penyampaian dijelaskan bahwa kerjasama internasional memang upaya untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara, yang mana stabilitas kawasan menjadi salah satu kepentingan dalam kerja sama tersebut.

Kerjasama internasional menjadi sesuatu yang sangat penting bagi peningkatan kapasitas militer dan pertahanan suatu negara, namun implementasinya tidak hanya digunakan untuk kegiatan ofensif namun juga dapat berlaku bagi pertahanan defensif suatu negara. Pada keadaan ini kerja sama internasional sangat penting bagi suatu negara dalam menghadapi

berbagai ancaman nyata baik dalam lingkup regional maupun internasional, pada keadaan ini tentu saja ancaman tersebut dapat bersifat tak terduga dan multisektor dengan proses penanganan secara kolaboratif seperti ancaman terorisme, bencana alam, kejahatan maritim, wabah penyakit, separatis, perang siber dan teknologi informasi, serta penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (Kementerian Pertahanan RI, 2014). Upaya-upaya kolaboratif sangat diperlukan untuk menangani berbagai ancaman nyata, yang mana hal ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas dalam kerangka kerjasama regional maupun internasional. Upaya-upaya yang dilaksanakan dapat melalui skema pembentukan *Confidence Building Measures* (CBM), pembangunan kapasitas, ikut serta dalam perwujudan perdamaian dunia, pendidikan dan pelatihan, serta upaya lainnya yang sesuai dengan kebijakan dan strategi Indonesia.

Pada akhirnya bagi Indonesia yang merupakan negara berkembang yang tidak memberikan fokus sepenuhnya pada aspek pertahanan dan keamanan, kerjasama internasional dalam sektor pertahanan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi perkembangan kapasitas militer Indonesia dan menjadi upaya untuk mengatasi berbagai potensi ancaman yang ada di regional maupun internasional. Pada keadaan ini kerjasama internasional dalam sektor pertahanan menjadi salah satu kebijakan unggulan yang dilakukan oleh Indonesia sebagai alternatif dari anggaran pertahanan yang besar, namun tetap dengan kerjasama ini hasil yang diinginkan harus didorong pula dengan pengembangan secara pribadi untuk meningkatkan kapasitas militer yang menjadi subjek dalam kerja sama yang dilaksanakan. Pada akhirnya terlihat bahwa urgensi dari kerjasama internasional dalam sektor pertahanan Indonesia menjadi sesuatu yang sangat penting, dalam hal ini untuk mencapai kepentingan dalam meningkatkan kapasitas militer dan mengatasi ancaman regional maupun internasional.

Kepentingan Indonesia dalam Kerjasama Pertahanan di Asia Tenggara

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letjen TNI M. Herindra menjelaskan bahwa peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan sangat penting untuk menjaga perdamaian, dalam hal ini menjaga keamanan

negara-negara di kawasan Samudera Hindia karena saat itu dirinya sedang menjadi pembicara dalam acara *Indian Ocean Region (IOR) Defence Minister Conclave* yang diikuti 26 negara pada tanggal 4 Februari tahun 2021. Pada kesempatan ini Herindra menjelaskan bahwa kerjasama dilakukan atas kepentingan untuk menjaga kawasan dari berbagai potensi ancaman, yang mana hal ini terjadi mengingat adanya peningkatan kompleksitas tantangan dan ancaman yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Penjelasan ini didukung dengan fakta bahwa Samudera Hindia merupakan yang terbesar ketiga di dunia dan menjadi jalur komunikasi laut terpenting di dunia, di samping menjadi jalur penting perdagangan dan transportasi internasional (Rahmat, 2021). Pada keadaan ini terdapat aspek geopolitik yang menjadikan kawasan Samudera Hindia sangat strategis, yang tentu seluruh keadaan ini akan menyebabkan berbagai benturan kepentingan dan pengaruh dari kekuatan besar dunia seperti layaknya Amerika Serikat dan Tiongkok. Keadaan ini lah yang menjadi salah satu ancaman besar bagi negara-negara di kawasan tersebut termasuk Indonesia dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara.

Indonesia merupakan negara besar yang berada pada posisi yang sangat strategis di kawasan yang sangat strategis pula yaitu Indo-Pasifik, sehingga bukan sesuatu yang mengejutkan apabila muncul berbagai potensi ancaman yang menyebabkan Indonesia harus bersiap-siap secara matang memberikan perlawanan terhadap keadaan darurat tersebut. Pada keadaan ini konsep stabilitas kawasan yang menjadi penting dalam kerjasama pertahanan merupakan sesuatu yang sangat penting, yakni untuk menjadikan suatu kawasan atau regional dapat membentuk ketahanannya sendiri sehingga dapat terlepas dari berbagai pengaruh maupun ancaman yang tidak diinginkan. Pada keadaan ini kita mengenal bahwa Indonesia berada dalam asosiasi bernama ASEAN yang merupakan perkumpulan dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara sebagai salah satu kawasan di dunia, yang mana negara-negara di Asia Tenggara sendiri memainkan peran yang cukup penting dalam dunia internasional terutama dalam aspek pertahanan dan keamanannya. Pada keadaan ini kita mengetahui bahwa

Asia Tenggara berada di posisi yang sangat strategis dan berada di tengah-tengah kawasan Indo-Pasifik yang tengah menjadi “perebutan” dua kekuatan besar dunia, sehingga upaya defensif sangat diperlukan oleh Asia Tenggara untuk mengatasi segala masalah tersebut.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara dalam sektor pertahanan dan keamanan, bagaimana tidak Indonesia berada di posisi 13 dunia negara dengan militer terbaik yang mana tentu menjadi pemimpin atau nomor wahid di kawasan Asia Tenggara. Pada keadaan ini Indonesia sebenarnya tetap mempertahankan politik luar negerinya yang bebas aktif, di mana perdamaian dunia menjadi tujuan utama kebijakan luar negeri Indonesia dengan melakukan kerjasama dan hubungan baik dengan seluruh negara di dunia. Dalam artian kebijakan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak memiliki “musuh” tertulis yang diidentifikasi sebagai ancaman utama bagi Indonesia, yang mana justru peneliti berpendapat keadaan ini menjadi salah satu penyebab kelengahan Indonesia dalam sektor pertahanan dan keamanan. Pada keadaan ini Indonesia harus melihat secara seksama kompetisi besar yang terjadi antara blok barat dan blok timur yang masih terjadi pasca Perang Dingin puluhan tahun yang lalu, yang mana kompetisi di antara kedua pihak tersebut semakin berkembang dengan fenomena terkini yang kita kenal dengan adanya rivalitas besar dari Amerika Serikat dan Tiongkok dalam berbagai aspek kehidupan seperti pertahanan dan keamanan, isu sosial-politik, serta perekonomian dan pasar internasional.

Pada keadaan dunia yang semakin tak terkendali ini, terbukti dengan pecahnya perang bersenjata (kontak fisik) di antara beberapa negara dunia seperti Perang Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel. Indonesia harus kembali melihat apakah pertahanan dalam negeri mereka telah berada di kondisi yang siap untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut, yang mana hal ini sangat penting sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan hidup warga negara dan peningkatan kapabilitas militer Indonesia. Pada keadaan ini memang kita mengetahui bahwa Indonesia tidak memiliki musuh tersurat akibat dari politik luar negeri yang bebas aktif, namun dikarenakan hal itu

pula Indonesia menjadi bias ancaman dikarenakan tidak dapat mengidentifikasi secara pasti bagaimana pandangan negara-negara dunia terhadap Indonesia dan kawasan di sekitarnya akibat hubungan baik yang selalu ingin diperjuangkan oleh Indonesia. Oleh karena itu pada akhirnya Indonesia diharuskan segera menerapkan secara maksimal *outward looking* dalam sistem pertahanannya, yang mana ancaman-ancaman yang terjadi di kawasan regional dan internasional dijadikan perhatian besar bagi pertahanan Indonesia sehingga dapat menentukan strategi yang sesuai.

Pada akhirnya cukup terlihat bagaimana pola kepentingan yang dimiliki oleh Indonesia dalam kerjasama pertahanan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang mana secara mendasar kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan ketahanan regional dalam perspektif ASEAN itu sendiri. Pada keadaan ini telah kita ketahui bahwa Indonesia memegang peranan utama dan dominan dalam koordinasi negara-negara di Asia Tenggara, yang mana terlihat betul bagaimana ambisi Indonesia untuk dapat menjadi negara yang berpengaruh dan terpandang dalam dunia internasional. Salah satu perkembangan ini terlihat dari Indonesia yang menginisiasi AOIP dan berhasil menekan isu maritim dalam agenda ASEAN, yang mana tentu saja hal ini berkaitan erat dengan perluasan cakupan kerja sama Indonesia dan membuka lebar jalan menuju visi Poros Maritim Dunia. Pada keadaan ini Indonesia melihat pembentukan AOIP sebagai jembatan baru untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang berada di luar perbatasan Indonesia, yang mana hal ini merupakan implimentasi dari *outward looking* sistem pertahanan Indonesia.

Asia Tenggara telah lama tentunya menjadi kawasan yang sangat strategis secara geopolitik, yang mana hal ini menimbulkan konsekuensi besar di mana banyak kepentingan-kepentingan asing yang saling berbenturan di dalam kawasan. Selain itu, masih ada pula beberapa gesekan yang ternyata masih terjadi di antara negara-negara Asia Tenggara walaupun telah terbentuknya ASEAN seperti konflik antara Indonesia dan Malaysia, Thailand dan Kamboja, serta beberapa contoh lainnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa mentalitas kompetitif antar negara masih cukup kuat

di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara, sehingga hal ini berpotensi menimbulkan konflik yang lebih besar dan berdampak pada instabilitas keamanan yang memancing masuknya kekuatan-kekuatan asing untuk ikut campur dalam konflik tersebut (Rusfiana, 2014). Indonesia memiliki kepentingan untuk dapat mengembangkan kerjasama pertahanan dengan negara-negara di Asia Tenggara untuk setidaknya menumbuhkan rasa percaya di antara satu sama lain, hal ini berupaya agar dapat membentuk stabilitas regional agar tidak mudah diintervensi oleh pihak asing.

Peran Ditkersinhan dalam Kerjasama Pertahanan Indonesia

Kerjasama internasional pertahanan yang dilakukan oleh sebuah negara tentu merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintahan di dalamnya, yang mana terdapat pula berbagai lembaga yang memiliki peran aktif untuk mendukung proses kerjasama tersebut hingga menjadi suatu bentuk kerjasama komprehensif. Pada keadaan ini tentu saja diperlukan suatu komponen negara yang memiliki tugas spesifik dalam menjalankan fungsi terkait dalam kerjasama internasional pertahanan, yang mana dalam hal ini Indonesia memiliki Ditkersinhan sebagai pelaksana tugas dan fungsi kerja sama internasional pertahanan di bawah nanungan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan di Kementerian Pertahanan Indonesia. Pada pasal 345 dan 346 dijelaskan mengenai Ditkersinhan dan tugas-tugas maupun fungsi yang dilaksanakan oleh Ditkersinhan, yang mana hal ini terdapat pada bagian keenam pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertahanan BAB VI Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan.

Pada dasarnya Ditkersinhan memiliki tugas utama untuk melakukan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan diplomasi pertahanan yang meliputi kerjasama bilateral, multilateral, pendidikan dan perizinan, serta koordinasi dengan atase pertahanan. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Ditkersinhan menjadi pemegang peran besar dan dominan dalam kerjasama internasional pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia, termasuk dengan negara-negara dari Asia Tenggara. Pada

keadaan spesifik tersebut Ditkersinhan terdiri atas beberapa bagian yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Subdirektorat Asia;
- b. Subdirektorat Amerika dan Pasifik;
- c. Subdirektorat Eropa dan Afrika;
- d. Subdirektorat Multilateral;
- e. Subdirektorat Atase Pertahanan, Pendidikan, dan Perizinan;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada akhirnya penelitian ini berfokus pada Subdirektorat Asia yang selanjutnya disebut dengan Subdit Asia yang dipimpin oleh Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Asia yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi pertahanan meliputi kerja sama bilateral pertahanan dengan negara-negara di kawasan Asia. Pada keadaan ini Subdirektorat Asia melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 sebagai berikut ini:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang diplomasi pertahanan meliputi kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Asia;
- b. Penyiapan penyusunan peraturan di bidang diplomasi pertahanan meliputi kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Asia;
- c. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang diplomasi pertahanan meliputi kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Asia; dan
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kerja sama bilateral pertahanan dengan negara-negara di kawasan Asia.

Pada keadaan ini Subdirektorat Asia pun masih dibagi menjadi tiga seksi utama untuk membagi fokus dari kerjasama internasional pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia, hal ini terjadi mengingat angka kerjasama

pertahanan yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya di antara Indonesia dengan negara lain di dunia ini termasuk dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ketiga seksi tersebut adalah Seksi Asia Tenggara, Seksi Asia Selatan-Barat; serta Asia Tengah-Timur yang menjadi tiga bagian utama dari Subdirektorat Kementerian Pertahanan RI. Pada keadaan ini seksi Asia Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang disebut dengan Kasi dan memiliki tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi pertahanan, penyusunan peraturan, pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi pertahanan meliputi kerja sama bilateral pertahanan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Pada hasil wawancara dalam penelitian ini terdapat hasil bahwa Ditkersinhan merupakan pintu paling utama bagi negara asing untuk melakukan kerja sama internasional terkhusus dalam bidang pertahanan dan keamanan, yang mana hal ini menunjukkan bahwa Ditkersinhan merupakan garda terdepan kerjasama internasional pertahanan Indonesia dengan negara-negara lain termasuk mereka yang berada di Asia Tenggara. Pada saat yang bersamaan narasumber menegaskan bahwa negara-negara di Asia Tenggara tidak dapat dikatakan istimewa bagi kerjasama pertahanan Indonesia, namun mereka telah lama terjalin hubungan seperti halnya dalam ruang lingkup ASEAN dan wadah forum ADMM (*ASEAN Defense Ministers Meeting*) yang mana Indonesia sendiri menjadi tuan rumah ADMM yang ke-17 pada tahun 2023 ini. Forum-forum yang dilakukan oleh Indonesia ini sangat penting untuk membahas berbagai isu-isu dan pernyataan bersama yang menghasilkan *joint declaration* yang disepakati 11 negara ASEAN. Oleh karena itu, menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Ditkersinhan untuk menyampaikan perwakilan dari Kemhan untuk menangani berbagai aspek terkhusus pertahanan di kawasan Asia Tenggara (Radit, 2023).

Pada hasil dari wawancara di atas diketahui pasti bahwa peran Ditkersinhan menjadi sangat besar dalam lingkup kerjasama internasional pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dalam lingkup negara-negara di Asia Tenggara, yang mana hal ini hanya merupakan permainan awak media

yang jarang memunculkan berita secara rinci dan mengangkat nama Ditkersinhan dengan hanya menyebutkan pemerintahan dari suatu negara atau maksimal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pada keadaan ini terlihat jelas bahwa peran Ditkersinhan sangat menyeluruh dalam setiap kerjasama pertahanan yang dilaksanakan, yakni telah dimulai semenjak Indonesia mendapatkan surat undangan untuk suatu forum bilateral atau multilateral maupun semenjak Indonesia mengundang negara lain untuk hadir dalam suatu forum internasional. Pada keadaan ini adalah contoh besarnya dari Ditkersinhan yang memulai persiapan pada ADMM ke-10 di Indonesia yang telah dimulai sejak invitasi kepada negara-negara anggota hingga persiapan seluruh perlengkapan acara, yang mana hal ini dilanjutkan dengan pengiriman delegasi terpilih untuk melaksanakan pertemuan bersama Presiden maupun menteri terkait hingga akhirnya melakukan pelaporan untuk dibentuk suatu draft kerjasama seperti dalam bentuk *Memorandum of Understanding (Mou)* atau *Defence Cooperation Agreement (DCA)* yang merupakan tingkat lanjut dari nota kesepahaman.

Pada penjelasan tersebut terlihat cukup jelas bahwa Ditkersinhan memiliki peran yang sangat menyeluruh dalam setiap kerjasama internasional pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia, dalam hal ini justru menjadi pemegang peran utama yang bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kerjasama hingga berkomitmen untuk memenuhi segala poin dari kerja sama yang dilaksanakan. Pada akhirnya Ditkersinhan betul menjadi garda terdepan bagi negara-negara yang ingin melakukan kerjasama internasional pertahanan dengan Indonesia baik melalui skema bilateral maupun multilateral, yang mana sejak saat itu juga Ditkersinhan langsung bertindak secara komprehensif menanggapi hal itu dengan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam perjanjian kerjasama internasional mulai dari permasalahan administrasi hingga kelengkapan di lapangan yang termasuk dengan tambahan individu. Pada akhirnya dengan berbagai kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara secara bilateral maupun multilateral di bawah lingkup ASEAN,

menunjukkan bahwa Ditkersinhan memiliki peran yang signifikan dalam kerjasama pertahanan dan keamanan Indonesia.

Perkembangan Kerjasama Pertahanan Indonesia di Asia Tenggara

Pada dasarnya Asia Tenggara menjadi kawasan di mana Indonesia berada dengan banyak negara-negara tetangga di sekitarnya yang telah tergabung dalam asosiasi ASEAN yang telah terbentuk semenjak tahun 1967, yang mana keberadaan ASEAN sendiri menjadi katalisator bagi perkembangan kerjasama internasional di antara negara-negara anggotanya tak terkecuali pada bidang pertahanan dan keamanan. Pada keadaan ini terlihat pula Indonesia yang banyak terlibat berbagai bentuk kerja sama pertahanan dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam skema hubungan bilateral, maupun dalam skema hubungan multilateral yang seringkali dipayungi oleh ASEAN sebagai katalisator dari kerjasama yang dilaksanakan. Apabila melihat pada sejarah Indonesia termasuk pula pada 5 negara pendiri ASEAN yang turut menandatangani perjanjian ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*) pada 27 November tahun 1971, yang mana hal ini dilanjutkan dengan adanya TAC (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*) pada tahun 1976 yang menjadi dasar dari hubungan kolaboratif dan kooperatif di antara negara-negara ASEAN dalam berbagai aspek. TAC sendiri memang menjadi prinsip dasar perdamaian dan hubungan kerjasama di antara negara-negara ASEAN yang juga dapat mengikat negara-negara di kawasan dan di luarnya, yang mana hal ini membuka peluang kemitraan strategis ASEAN termasuk dalam aspek pertahanan (ASEAN, 2023).

Pada lingkup regional sebagai ASEAN kita mengenal pula adanya tiga pilar dalam ASEAN yaitu APSC (*ASEAN Political-Security Community*), AEC (*ASEAN Economic Community*), dan ASCC (*ASEAN Socio-Cultural Community*). APSC sendiri merupakan pilar yang merupakan upaya untuk mewujudkan keamanan bersama, perdamaian, dan lingkungan kawasan yang stabil dan merupakan konsep pilar yang diajukan langsung oleh Indonesia, berbeda dengan AEC sebagai pilar perekonomian yang diusulkan oleh Singapura dan Thailand. Sejak awal terbentuknya ASEAN kita mengetahui bahwa telah terdapat berbagai kerjasama seperti dalam bidang ekonomi dan sosial, yang

mana hal ini berkembang hingga negara-negara ASEAN menyadari pentingnya kerangka legal formal dalam bidang kerja sama keamanan dengan lahirnya ide pembentukan APSC tadi. Ide pembentukan APSC sendiri muncul pertama kali pada KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003, yang mana ide pembentukan ini termasuk satu dari tiga pilar ASEAN *Community* yang ditandai dengan Bali Concord II sebagai awal terbentuknya pilar-pilar tersebut yang dipercepat menjadi pada akhir tahun 2015 (Luthfi, 2020).

Pada APSC ini kita dapat mengetahui salah satu komunitas ASEAN yang memang berfokus pada kerjasama politik dan keamanan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat di Asia Tenggara, yang mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama pertahanan antar negara anggota ASEAN untuk mengatasi berbagai ancaman yang ada termasuk permasalahan mengenai demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Pembentukan APSC sendiri sejatinya sesuai dengan tujuan utama ASEAN dalam Deklarasi Bangkok yakni membentuk suatu wilayah politik dan keamanan yang bertujuan mendamaikan segala sengketa antar negara-negara di Asia Tenggara, persengketaan ini diantaranya adalah perbatasan dan teritorial, konflik etnis, gerakan separatis, pemberontakan komunis, hingga ketakutan negara kecil kepada negara besar yang mana APSC dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi seluruh permasalahan tersebut dan memajukan perdamaian serta stabilitas kawasan. Oleh karena itu, sesungguhnya kita dapat melihat bahwa ASEAN sendiri merupakan suatu komunitas keamanan dikarenakan didorong oleh semangat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anggotanya. Pada akhirnya perkembangan APSC ditujukan untuk membentuk komunitas kerjasama dalam bidang pertahanan untuk menyelesaikan permasalahan, seperti halnya APSC ini terintegrasi dengan beberapa perjanjian seperti ZOPFAN, TAC, serta SEANWFZ (*Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone*).

Pada akhirnya ASEAN menjadi suatu wadah aktif bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk melaksanakan kerjasama pertahanan dan keamanan, yang mana pembicaraannya dapat dilaksanakan melalui berbagai skema aktif ASEAN seperti melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT),

pembahasan melalui forum aktif berupa ARF (*ASEAN Regional Forum*) yang terbentuk pada tahun 1994, hingga beberapa platform lainnya yang dapat digunakan sebagai tempat kerjasama antar negara. Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan yang paling menonjol di ASEAN adalah melalui ADMM (*ASEAN Defence Ministers Meeting*) yang terbentuk pada tahun 2006 di Malaysia, yang mana ADMM sendiri merupakan pertemuan tingkat Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN untuk mendiskusikan berbagai masalah pertahanan di kawasan dengan tujuan memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui kerjasama di bidang pertahanan (ASEAN, 2023). Pada tahun 2023 ini Indonesia bahkan menjadi tuan rumah bagi *ASEAN Defence Senior Officials Meeting* (ADSOM) pada tanggal 2 Agustus 2023 di Jakarta, *ASEAN Defence Senior Officials' Meeting Plus* (ADSOM-PLUS) pada tanggal 3 Agustus 2023, serta ADMM ke-17 dan ADMM-PLUS ke-10 pada tanggal 15-16 November tahun 2023 (Kementerian Pertahanan RI, 2023). Keadaan ini menunjukkan bahwa Indonesia berperan cukup aktif dalam kerjasama pertahanan dan keamanan dalam lingkup ASEAN itu sendiri.

Perkembangan lain dalam kerjasama dalam lingkup pertahanan dan keamanan di ASEAN adalah usulan mengenai *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) yang diusulkan oleh Indonesia, yang mana hal ini merupakan bentuk skema kerjasama pertahanan negara-negara ASEAN yang telah diadopsi pada tahun 2019. AOIP sendiri merupakan suatu konsep di mana ASEAN menunjukkan representasi suara kolektif mengenai wacana Indo-Pasifik seperti halnya yang dilakukan *the Quad* (*Quadrilateral Security Dialogue*) antara Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia. Pada pembentukan AOIP sendiri dilatarbelakangi oleh ketidaknyamanan Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN terhadap rivalitas besar yang terjadi antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik (Setyorini, 2022), yang mana terlihat upaya dari Amerika Serikat untuk mengisolasi Tiongkok yang bahkan sekarang semakin terlihat dengan adanya pendirian AUKUS yang merupakan aliansi pertahanan di antara tiga negara besar yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang bahkan dua negara di antaranya sama sekali tidak berada di kawasan Indo-Pasifik. AOIP sendiri mulai

menunjukkan ASEAN yang khawatir akan kelangsungan hidup dan stabilitas kawasannya atas apa yang terjadi di Indo-Pasifik, yang mana tentu saja rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak dapat dianggap kecil karena dapat memberikan dampak yang sangat signifikan bagi ASEAN.

Perkembangan kerja sama lainnya antara Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara dalam lingkup bilateral maupun multilateral dapat dilihat dari *website* Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dalam lingkup ASEAN sendiri beberapa di antaranya terdapat ASEAN Regional Forum (ARF) yang membahas kerjasama dalam pilar APSC pada 21 Juni 2023 yang membahas tentang prospek jangka panjang dari perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan, serta dengan adanya lingkup kerja sama trilateral dalam skema INDOMALPHI pertemuan ke-21 *Joint Working Group Meeting on the Trilateral Cooperative Agreement* di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2023. Ditkersinhan menjelaskan bahwa kerjasama ini semakin meningkatkan upaya kolaboratif di antara ketiga negara untuk berkontribusi ada perdamaian dan keamanan kawasan secara keseluruhan, yang mana hal ini diwujudkan dengan kerjasama pertahanan dan keamanan di sepanjang perbatasan laut ketiga negara terkhusus Laut Sulawesi dan Laut Sulu (Kementerian Pertahanan RI, 2023). Kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia seperti yang telah disampaikan beberapa contohnya merupakan peran aktif dari Ditkersinhan itu sendiri, yang mana dengan ini terlihat bahwa peran yang dilaksanakan cukup efektif untuk memperluas cakupan kerjasama pertahanan Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

KESIMPULAN

Kerjasama internasional dalam bidang pertahanan dan keamanan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas militernya, yang mana hal ini bertujuan pula untuk membentuk sistem pertahanan terhadap ancaman-ancaman yang ada di regional maupun internasional. Pada keadaan ini Indonesia mulai menggunakan pandangan *outward looking* dalam melihat potensi-potensi ancaman yang ada di dunia regional dan internasional seperti halnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik dan eskalasi konflik

di Laut China Selatan, keadaan ini menunjukkan adanya kekhawatiran dari Indonesia terhadap apa yang terjadi di dunia internasional akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakatnya. Pada akhirnya melakukan kerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara menjadi salah satu langkah Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya dalam aspek pertahanan ini, yang mana Indonesia berusaha membentuk dan mempertahankan stabilitas kawasan Asia Tenggara supaya menjadi regional yang tidak mudah untuk dimasuki pengaruh dan intervensi negara-negara asing. Keadaan ini sangat penting mengingat Asia Tenggara berada pada posisi di tengah-tengah kawasan Indo-Pasifik yang menjadi medan “perebutan” pengaruh dari dua kekuatan besar dunia, yang mana dengan ini Indonesia tidak ingin ASEAN jatuh ke tangan salah satu kekuatan yang akan menyebabkan berbagai ancaman semakin dekat bagi Indonesia.

Penelitian ini juga menunjukkan jika Ditkersinhan memiliki peranan yang efektif dan kontribusi yang sangat besar terhadap kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara, yang mana dalam hal ini Ditkersinhan memiliki tanggung jawab pelaksana tugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan diplomasi pertahanan yang meliputi kerja sama bilateral, multilateral, pendidikan, dan perizinan serta koordinasi dengan atase pertahanan. Pada penelitian ini terlihat bahwa peranana Ditkersinhan sangat efektif bagi pertahanan Indonesia dengan langkah-langkah yang sistematis dalam kerjasama pertahanan yang dilakukan, dalam hal ini peran Ditkersinhan telah dimulai sejak awal adanya undangan pertemuan ataupun Indonesia sendiri yang memberikan undangan kepada negara lain untuk melakukan suatu perundingan yang terkait kerjasama pertahanan. Pada keadaan ini peran yang dimainkan oleh Ditkersinhan terus berkembang hingga mereka mulai melakukan persiapan administrasi bagi pelaksanaan pertemuan-pertemuan tersebut, pada acara sendiri Ditkersinhan mengirimkan delegasinya untuk memainkan peran pelapor sekaligus membentuk suatu draft kerjasama yang merupakan kebijakan luar negeri Indonesia dalam skema kerjasama internasional pertahanan.

Saran

Pertama, Indonesia perlu terus memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kerjasama pertahanan dengan negara-negara di Asia Tenggara, mengingat saat ini terjadi eskalasi konflik di kawasan regional maupun internasional sehingga penting untuk membentuk ketahanan kawasan sebagai salah satu kepentingan nasional Indonesia.

Kedua, pemerintah dan media dapat lebih menonjolkan peran dari Ditkersinhan sendiri dalam segala publikasi yang berkaitan dengan kerjasama internasional pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia termasuk dengan negara-negara di Asia Tenggara, hal ini menjadi sesuatu yang cukup penting agar Ditkersinhan dapat lebih dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga yang menjadi garda terdepan kerja sama internasional pertahanan Indonesia dengan negara-negara di dunia.

Ketiga, pelaksanaan berbagai kerjasama pertahanan harus mulai memasuki tahap implementasi secara efektif dan komprehensif, yang mana hal ini bertujuan agar Indonesia dapat meningkatkan kapasitas militernya dengan lebih baik sebagai salah satu kepentingan Indonesia dalam menjaga kedaulatan negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN. (2023). *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC): Overview*. Diakses dari <https://asean.org/our-communities/asean-political-security-community/outward-looking-community/treaty-of-amity-and-cooperation-in-southeast-asia-tac/>. Tanggal 13 Oktober 2023.
- Creswell, J. W. & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 5th Edition*. Sage Publications.
- GFP. (2023). *2023 Military Strength Ranking*. Diakses dari <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php>. Tanggal 29 Oktober 2023.
- GFP. (2023). *Defense Budget by Country (2023)*. Diakses dari <https://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.php>. Tanggal 29 Oktober 2023.
- Hermawan, N. (2015). *Tinjauan Optimalisasi Kerjasama Militer TNI AD Menuju World Class Army*. Diakses dari <https://tniad.mil.id/tinjauan->

[optimalisasi-kerjasama-militer-tni-ad-menuju-world-class-army/](#).

Tanggal 21 Agustus 2023.

- Kementerian Pertahanan RI. (2008). *Buku Putih Pertahanan* (Kemhan RI).
- Kementerian Pertahanan RI. (2014). *Menhan RI Tegaskan Pentingnya Kerjasama Internasional untuk Ciptakan Perdamaian dan Stabilitas*. Diakses dari <https://www.kemhan.go.id/2015/10/08/menhan-ri-tegaskan-pentingnya-kerjasama-internasional-untuk-ciptakan-perdamaian-dan-stabilitas-2.html>. Tanggal 30 Oktober 2023.
- Kementerian Pertahanan RI. (2023). *ADMM 2023: Peace, Prosperity, and Security*. Diakses dari <https://admm2023-indonesia.kemhan.go.id/>. Tanggal 7 Desember 2023.
- Kementerian Pertahanan RI. (2023). *Berita Kegiatan Ditkersinhan*. Diakses dari <https://www.kemhan.go.id/strahan/category/berita/kegiatan-ditkersin#>. Tanggal 3 November 2023.
- Luthfi, A. (2020). *Sejarah Perkembangan ASEAN Political-Security Community (APSC)*. Diakses dari <https://www.dictio.id/t/bagaimana-sejarah-perkembangan-asean-political-security-community-apsc/125582>. Tanggal 13 Oktober 2023.
- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif, edisi Revisi*. Bandung.
- Pebriawan, G. D. Dkk. (2023). "Birokrasi Sipil dan Militer: Dominasi Aktor Militer dalam Tubuh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)*. 3 (2).
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (BAB IV: DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN).
- Radit. (2023). Pegawai Ditkersinhan – Kemhan RI, Wawancara (Jakarta, 7 November 2023).
- Rahmat, Y. (2021). *Wamenhan: Pentingnya Kerjasama Pertahanan Negara Kawasan Samudera Hindia*. Diakses dari <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/508288/wamenhan-pentingnya-kerjasama-pertahanan-negara-kawasan-samudera-hindia>. Tanggal 2 November 2023.
- Rusfiana, (2014). "Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM)". *Jurnal Pertahanan*. 4 (2).
- Sekretariat Nasional ASEAN. (2023). *ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM)*. Diakses dari <https://setnasasean.id/asean-defence-ministers-meeting-admm>. Tanggal 20 Oktober 2023.
- Setyorini, I. D. Dkk. (2022). "Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)". *Jurnal Transformasi Global*. 9 (2).
- Universitas Islam Indonesia. (2018). *Kerjasama Antar Negara Tingkatkan Stabilitas dan Pertahanan Negara*. Diakses dari

<https://www.uui.ac.id/kerjasama-antar-negara-tingkatkan-stabilitas-dan-pertahanan-negara/>. Tanggal 30 Oktober 2023.

Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. California: Addison-Wesley Publishing Company.